

ROLE OF BOSDA PROGRAM IN EXPANDING ACCESS TO EDUCATION AT SMKN 1

BY:

(Neillisa Regga Syahputri, Hermi Yanzi, Abdul Halim)

The purpose of this research is to describe the role of regional School Operations Assistance (BOSDA) in the expansion of access to education in SMK Negeri 1 Bandar Lampung. The research method used in this research is a qualitative descriptive with the subject of the principal's research, the treasurer of BOSDA School, the educators and learners of classes XI BOSDA receivers. Data collection techniques using interviews, observations, and documentation while analyzing data using credibility tests with source criticism and triangulation.

The results of this research showed that the role of BOSDA program in the expansion of access to education in SMK Negeri 1 Bandar Lampung has been implemented properly, such as giving educational efforts for poor students to be able getting appropriate facilities at SMK Negeri 1 Bandar Lampung by freeing up the cost of SPP, purchasing and copying textbooks, activities and programmes for learners who can not afford, and to assist with the operation of learning by equipping the tools and materials of practice.

Keywords: *roles, BOSDA Program, expanded education access*

PERAN PROGRAM BOSDA DALAM PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN DI SMKN 1

OLEH:

(Neillisa Regga Syahputri, Hermi Yanzi, Abdul Halim)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang peran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dalam perluasan akses pendidikan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Kepala Sekolah, Bendahara BOSDA Sekolah, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik Kelas XI Penerima BOSDA. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan kritik sumber dan triangulasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran program BOSDA dalam perluasan akses pendidikan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung telah dilaksanakan dengan baik, seperti memberikan upaya mengenyam pendidikan bagi peserta didik tidak mampu di SMK Negeri 1 Bandar Lampung dengan membebaskan biaya SPP, pembelian dan penggandaan paket buku pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan program bimbel/les bagi peserta didik tidak mampu, serta membantu operasional pembelajaran dengan melengkapi alat dan bahan praktik.

Kata Kunci: *Peran, Program BOSDA, Perluasan Akses Pendidikan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara yang maju bermula dari pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan berkualitas tentunya dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Berbagai masalah pendidikan yang ada, pemerintah memegang peranan penting dalam memudahkan akses pendidikan, seperti yang kita ketahui bahwa akses pendidikan di Indonesia masih dikatakan sulit mengingat tingginya biaya pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” guna mendukung perluasan akses pendidikan.

Perluasan akses pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Lampung masih belum berjalan dengan baik. Pada permasalahan ini, pemerintah Daerah Lampung memiliki tanggung jawab untuk memberikan solusi dan mengatasinya. Perluasan akses pendidikan pada dasarnya dituntut untuk memperluas kesempatan serta menghapuskan diskriminasi terhadap anak dari keluarga miskin agar ikut merasakan mendapat pendidikan yang layak dan bermutu. Perluasan akses pendidikan ini hendaknya diawasi dan di kontrol dengan baik agar tidak terjadinya kecurangan oleh oknum-oknum yang tidak

bertanggung jawab demi kepentingan pribadi.

Sebagai upaya untuk menciptakan manusia bermutu dan mencerdaskan bangsa, pemerintah memiliki peran sangat penting dalam bidang pendidikan, yang mana pemerintah harus membuat suatu kebijakan dalam ranah pendidikan yang dapat mewujudkan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tertulis dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu” yang berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib untuk berupaya memenuhinya. Sebagai wujud konsistensi dalam penyelenggara pemerintah daerah, pemerintah daerah Indonesia khususnya pemerintah Provinsi Lampung membuat tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017. Peraturan ini berkaitan dengan pemberian bantuan dana bagi siswa yang tidak mampu guna menyetarakan pendidikan bagi peserta didik khususnya pada satuan pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan.

Tujuan program ini adalah untuk perluasan dan pemerataan pendidikan guna membantu mengentaskan kemiskinan melalui

kemudahan dalam akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu agar mendapat kehidupan masa depan yang lebih baik. Di Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota yang mendapatkan satuan biaya antara lain ialah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan. Program BOSDA dibentuk untuk menjadi pendamping bagi program BOSNAS serta diharapkan agar dapat menutupi kekurangan BOSNAS yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat dengan dengan tujuan yang sama yaitu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu guna meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat agar tetap mampu memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Berdasarkan survey awal yang telah peneliti amati, ternyata ada beberapa faktor dalam pelaksanaan pendidikan di Provinsi Lampung khususnya pada SMK Negeri 1 Bandar Lampung masalah paling signifikan adalah biaya, tidak sedikit anak-anak yang tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan masyarakat menganggap bahwa biaya sekolah terlalu besar. Ini jelas menjadi sebuah permasalahan yang tidak bisa dianggap sebelah mata, tidak hanya biaya saja yang menjadi masalah utama tetapi ada faktor lain seperti kurangnya kesadaran orangtua akan pentingnya sekolah bagi anak-anak mereka.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada peserta didik SMK penerima program BOSDA diketahui bahwa mereka mengakui jika tidak

mendapatkan bantuan dari program BOSDA kemungkinan kesempatan mereka bersekolah sangat kecil mengingat pekerjaan orangtua yang dapat dikatakan tidak cukup untuk membayar uang sekolah, karena pada dasarnya sekolah formal tidak hanya membayar iuran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) tetapi masih ada keperluan yang harus di bayar, seperti seragam sekolah, buku penunjang pelajaran, alat-alat tulis dan sebagainya. Oleh karena itu, kesempatan untuk bersekolah ini dimanfaatkan untuk kehidupan yang lebih baik dimasa depan. Hal ini yang harus dipertimbangkan dalam perluasan akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu agar mereka dapat mengetahui hal yang berkaitan dengan bantuan-bantuan dalam bidang pendidikan seperti program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) guna membantu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Fokus Penelitian

Masalah yang akan diteliti oleh penulis difokuskan terhadap peran program BOSDA dalam perluasan akses pendidikan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung, maka sub-fokus pada penelitian ini meliputi:

1. Peran Program BOSDA Sekolah dilihat dari ketepatan sasaran program, tujuan Program, serta efektif dan efisien berjalannya program di Sekolah.
2. Upaya perluasan akses pendidikan yang dilakukan di sekolah dengan mengedepankan kesamaan memperoleh hak mengakses layanan pendidikan dan mendapatkan perlakuan adil dalam pelayanan pendidikan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran program BOSDA dalam perluasan akses pendidikan.
2. Untuk mendeskripsikan peran program BOSDA dalam perluasan akses pendidikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Peran

Peran secara luas diartikan sebagai tindakan dari individu atau kelompok sesuai dengan status sosial. "Peran (*role*) adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu" Cohen (Syarbaini dan Rusdiyanta, 2009: 60). Sejalan dengan pendapat tersebut "peran dapat didefinisikan sebagai keteraturan perilaku yang diharapkan individu" Supardi (2011: 88).

Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik

Dye (Subarsono, 2013: 2) mengemukakan "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*)." Kebijakan publik adalah "pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat (*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*)" Easton (Anggara, 2014: 35). Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat

oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industry, pertahanan, dan sebagainya. Suatu kebijakan dibuat dari pemerintah kepada rakyat untuk mencapai tujuan bersama.

Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Wahab (2012: 20) yaitu:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.

Jenis-Jenis Kebijakan

Anderson (Subarsono, 2013: 20) menjabarkan jeni-jenis kebijakan sebagai berikut:

- a. Kebijakan substantif vs kebijakan procedural
- b. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif
- c. Kebijakan material vs kebijakan simbolis
- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan

Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan menurut Dunn (2003: 24) sebagai berikut:

- a. Tahap Penyusunan Agenda
- b. Tahap Formulasi Kebijakan
- c. Tahap Adopsi Kebijakan
- d. Tahap Implementasi Kebijakan
- e. Tahap Evaluasi Kebijakan (Penilaian Kebijakan)

Kebijakan Pendidikan

Bakry (2010: 4) menjelaskan bahwa “kebijakan pendidikan merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari visi dan misi pendidikan bernuansa esensi manusia berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya.” Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan diartikan sebagai proses dari suatu wewenang dalam ranah pendidikan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi misi pendidikan yang dapat memperluas akses khususnya dibidang pendidikan.

Tinjauan Tentang Pendidikan

Pengertian Pendidikan

Secara etimologi, istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedagogie* terdiri dari kata “PAIS” yang artinya anak dan “AGAIN” yang artinya membimbing. Jadi pendidikan atau *paedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan kepada anak oleh orang dewasa agar ia dapat menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri. “Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil bagi

suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka” Ihsan (2008: 2).

Teori-Teori Pendidikan

Kadir, Fauzi dkk (2012: 141) mengemukakan teori-teori pendidikan, yaitu:

- a. Teori Pendidikan Klasik (*Classical Education*)
Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik, yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan dan meneruskan budaya.
- b. Teori Pendidikan Personal
Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan minat peserta didik.
- c. Teori Pendidikan Interaksional
Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya.

Faktor-Faktor Pendidikan

Menurut Barnadib (Hasbullah, 2008: 10) pembuatan mendidik dan dididik memuat faktor-faktor tertentu yang memengaruhi dan menentukan, yaitu:

- a. Adanya tujuan yang hendak dicapai
- b. Adanya subjek manusia (pendidik dan anak didik) yang melakukan pendidikan

- c. Yang hidup bersama dalam lingkungan hidup tertentu (*milieu*).
- d. Yang menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai tujuan.

keterampilan demi tercapainya tujuan sementara. Misalnya, anak belajar membaca, menulis, matematika, berhitung, dan sebagainya.

Tujuan Pendidikan

Langeveld (Ahmadi dan Uhbiyati, 2015: 103) mengemukakan serangkaian tujuan pendidikan, sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum (tujuan lengkap dan tujuan total).
Sebagaimana yang telah diuraikan dalam “usaha-usaha pendidikan” maka tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan anak didik.
- b. Tujuan Khusus.
Untuk mencapai tujuan umum, pasti ada suatu tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan akan memperoleh corak yang khusus dengan tidak mengubah sifat tujuan umum.
- c. Tujuan tak lengkap (masih terpisah-pisah).
Ini adalah tujuan yang berkaitan dengan kepribadian manusia dari satu aspek saja, yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup tertentu.
- d. Tujuan sementara.
Tujuan sementara ini adalah titik-titik perhatian sementara, yang kesemuanya itu sebagai persiapan, untuk menuju kepada tujuan umum tersebut.
- e. Tujuan *insidental*.
Tujuan ini sesungguhnya adalah tujuan yang terpisah dari tujuan umum, tetapi kadang-kadang mengambil bagian dalam menuju ke tujuan umum.
- f. Tujuan *Intermedier*.
Tujuan ini adalah tujuan yang berkaitan dengan penguasaan sesuatu pengetahuan atau

Tinjauan Tentang Program BOSDA

Pengertian Program BOSDA

Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau disingkat BOSDA merupakan program yang ditujukan kepada peserta didik yang tergolong keluarga tidak mampu. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 menyebutkan bahwa “BOSDA adalah Program Pemerintah Provinsi Lampung berupa pemberian dan langsung ke Satuan Pendidikan Menengah baik Negeri maupun Swasta pada Kota Bandar Lampung dimana besaran dana bantuan yang diterima di sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa tidak mampu masing-masing sekolah dan satuan biaya (Unit Cost) bantuan sedangkan Satuan Pendidikan Menengah Negeri Untuk Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan berdasarkan jumlah siswa pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan jumlah siswa tidak mampu pada Satuan Pendidikan Menengah Swasta.”

Tujuan Program BOSDA

Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017, Secara Umum Program BOSDA SMA/SMK bertujuan untuk membantu pembiayaan pendidikan dalam rangka program pendidikan

menengah universal yang bermutu. Secara khusus program BOSDA SMA/SMK bertujuan sebagai berikut:

- a. Membantu biaya operasional sekolah;
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Negeri/Swasta;
- c. Memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Sasaran Program BOSDA

Sasaran bantuan BOSDA Provinsi Lampung adalah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Swasta di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan. Dengan sasaran program di sekolah ditujukan kepada peserta didik tidak mampu.

Tinjauan Tentang Perluasan Akses Pendidikan

Perluasan akses pendidikan lebih mengacu kepada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada awalnya dengan program beasiswa. Program beasiswa dibentuk untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi peserta didik yang tidak mampu dan berpotensi akademis dengan memberi bantuan berupa biaya pendidikan. Program beasiswa ini semakin intensif dan mengalami pembaruan apalagi memandang perekonomian ketika terjadi krisis ekonomi.

Perluasan akses pendidikan sesuai dalam Depdiknas (Kintamani, 2008: 1076) dijelaskan bahwa "Perluasan akses pendidikan merupakan isu strategi dan prioritas yang pertama dalam pembangunan pendidikan

nasional. Perluasan akses pendidikan dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan itu tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis."

Perluasan akses pendidikan merupakan perluasan kesempatan bagi peserta didik tidak mampu agar dapat mengakses pendidikan dengan program yang telah dibuat pemerintah. Pada perkembangannya, pemerataan dan perluasan akses pendidikan itu diserahkan kepada program kebijakan di bidang pendidikan seperti program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Irianto (2012: 9) mengemukakan "Tujuan dan sasaran pengembangan pendidikan harus diarahkan pada upaya meningkatkan daya tampung pada setiap jenjang satuan pendidikan, dengan memberikan kesempatan kepada semua penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan dengan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang *pluralistik* yang disertai dengan tanggung jawab dalam memberikan konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah masyarakat".

Perluasan akses pendidikan mencakup "indikator atau dua aspek penting yaitu *equality* dan *equity*. *Equality* atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat" Badruzzaman (2013: 4).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (Herdiansyah, 2012: 9) mengemukakan “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya”. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

Subjek Penelitian atau Informan

Subjek Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang dipilih dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2017: 300). Subjek penelitian atau Informan yang dipilih haruslah memiliki syarat bahwa ia merupakan orang yang mengenal subyek dengan baik dan mengetahui karakteristik yang diteliti dari subyek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan, maka subyek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung
2. Bendahara BOSDA SMK Negeri 1 Bandar Lampung
3. Guru atau tenaga pendidik SMK Negeri 1 Bandar Lampung

4. Peserta didik Kelas XI Penerima program BOSDA di SMK Negeri 1 Bandar Lampung

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi tentang data yang diperlukan dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti mengumpulkan sendiri data-data tersebut dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitiannya.

Data dan Sumber Data

Data utama atau primer merupakan dokumen yang didapatkan peneliti langsung dari sumber utama yaitu Kepala Sekolah, guru/tenaga pendidik, dan bendahara BOSDA SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Data utama dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan program BOSDA seperti Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017, data peserta didik yang mendapatkan dana BOSDA di SMK Negeri 1 Bandar Lampung serta data tenaga pendidik yang ada. Data sekunder di kumpulkan peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data-data sekunder didapatkan peneliti melalui dokumentasi-dokumentasi saat observasi ke SMK Negeri 1 Bandar Lampung. . Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan siswa penerima program BOSDA disekolah serta sumber data sekunder lain seperti berita surat kabar, website, artikel, dan referensi-referensi yang menjadi panduan tentang Perluasan Akses Pendidikan ini selama proses

penelitian agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini untuk mengukur uji kredibilitas, antara lain:

1. Kritik Sumber (Kritik Intern dan Ekstern)
2. Triangulasi

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu:

1. **Reduksi Data (*Data Reduction*)**
Peneliti memilih hal-hal pokok dan penting bagi penelitian. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis menajamen, menyederhanakan, pengabsrakan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.
2. **Penyajian Data (*Data Display*)**
Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Sekumpulan informasi disusun, kemudian dikelompokkan pada bagian atau

sub bagian masing-masing data yang didapat dari lapangan.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Setelah ditarik kesimpulan, peneliti melakukan cek ulang terhadap proses reduksi data dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 yang dikaitkan dengan pemberian bantuan mengakses pendidikan kepada peserta didik tidak mampu pada jenjang pendidikan menengah atas dan kejuruan yang menjadi landasan pokok dalam melaksanakan penelitian tentang Peran Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Dalam Perluasan Akses Pendidikan Di SMK Negeri 1 Bandar Lampung.

Peneliti melakukan wawancara terhadap 5 Informan yang terdiri dari Kepala Sekolah dengan kode KS, Bendahara BOSDA Sekolah dengan kode BBS, Tenaga Pendidik/Guru dengan kode TP serta Peserta Didik

dengan kode PD 1 dan PD 2. Wawancara dilakukan dengan cara semi-terstruktur dan pengamatan secara mendalam menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik ini yang disebut dengan teknik triangulasi. Pada analisis data, menggunakan kritik sumber dan triangulasi. Kritik sumber guna meneliti outensitas dan kredibilitas sumber yang diperoleh, kemudian triangulasi digunakan untuk mendukung kebenaran atau keakuratan data yang didapatkan. Teknik awal yang dilakukan adalah wawancara mendalam dengan para informan kemudian mengobservasi pelaksanaan dilapangan dan didokumentasikan kebenarannya. Setelah itu peneliti melakukan konfirmasi antar sumber dan teknik dalam penelitian. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dioleh sesuai dengan variabel-variabel penelitian serta disajikan dalam bentuk data deskriptif sebagai berikut:

1. Peran Program BOSDA

Sebagai wujud konsistensi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang sesuai dengan UUD 1945 Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengalokasikan dana melalui APBD Provinsi Lampung sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memajukan pendidikan yang ada di provinsi Lampung. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyusun suatu program untuk perluasan dan pemerataan pendidikan jenjang SMA/SMK sederajat yaitu program BOSDA.

Peneliti melakukan proses wawancara dengan informan terkait program BOSDA dengan mengetahui sasaran program BOSDA Sekolah, Tujuan Program BOSDA Sekolah dan Efektif/Efisien Program BOSDA seiring berjalannya program ini di SMK Negeri 1 Bandar Lampung serta melakukan pemantauan langsung dan mendapatkan data-data yang diperlukan.

a. Ketepatan Sasaran Program BOSDA Sekolah

Pada program BOSDA Sekolah, sasaran program ini diperuntukan untuk membantu dana operasional pembelajaran di sekolah tetapi lebih difokuskan kepada peserta didik penerima BOSDA di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Sasaran program BOSDA yang terselenggara di sekolah telah diperkuat dengan pertanyaan nomor 5 yang diajukan ke Kepala Sekolah, bahwa sasaran penerima program BOSDA telah tepat diberikan kepada peserta didik tidak mampu dan dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan.

b. Tujuan Program BOSDA Sekolah

Tujuan program BOSDA di SMK Negeri 1 Bandar Lampung mengedepankan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan agar peserta didik tidak mampu mendapatkan kesempatan untuk mengakses pendidikan khususnya bagi peserta didik yang memiliki minat terhadap Sekolah Menengah Kejuruan dengan membebaskan pungutan biaya pendidikan bagi peserta didik.

Program BOSDA SMK Negeri 1 Bandar Lampung lebih kepada bantuan biaya pendukung operasional seperti membantu biaya SPP peserta didik tidak mampu, melengkapi fasilitas sarana prasarana alat dan bahan praktik contohnya komputer, membebaskan biaya tambahan ekstrakurikuler dan prakerin. Kemudian, di SMK Negeri 1 Bandar Lampung terdapat bimbel/les wajib yang dilakukan di sekolah, penerima BOSDA dalam hal ini juga dibebaskan dalam biaya pelajaran tambahan. Walaupun, biaya personalia yang meliputi biaya pribadi seperti baju seragam, baju jurusan, sepatu, tas, uang saku, dan biaya pribadi lain merupakan tanggung jawab peserta didik.

c. Efektif dan Efisien Program BOSDA Sekolah

Untuk melihat suatu program berjalan dengan baik, tentu program tersebut harus dapat beriringan berjalan dengan efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal itu, Seiring berjalannya program BOSDA di SMK Negeri 1 Bandar Lampung dilihat dari pengamatan serta wawancara dengan informan, program ini berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan karena seyogianya program dapat berjalan efektif dan efisien harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan walaupun terdapat kendala kecil seperti keterlambatan pencairan dana yang kemudian berimbas kepada terhambatnya keperluan sekolah, tetapi pihak sekolah harus berupaya untuk mengatasinya

dengan pemberian sosialisasi kepada seluruh masyarakat di lingkungan SMK Negeri 1 Bandar Lampung.

2. Perluasan Akses Pendidikan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin perluasan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Bentuk dari perluasan akses pendidikan pada penelitian ini difokuskan kepada pendidikan formal di sekolah. Perluasan akses pendidikan formal dapat membantu peserta didik mengenyam akses pendidikan serta menjadikan peserta didik manusia yang berakhlak, bermartabat, cerdas, dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila yang berguna bagi bangsa dan negara. Sehingga keputusan pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan formal dalam perluasan akses pendidikan minimal dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan formal ini berlaku di SMK Negeri 1 Bandar Lampung.

Di SMK Negeri 1 Bandar Lampung, program BOSDA yang diberikan kepada peserta didik sebesar 60 persen dalam perluasan akses pendidikan dengan bentuk program BOSDA demi meningkatkan mutu pendidikan agar lebih berkualitas. Perluasan akses pendidikan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung tidak hanya semata-mata untuk memberikan kesempatan

mengenyam pendidikan saja, tetapi berupaya untuk menekan angka putus sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan. Peneliti melakukan proses wawancara dengan informan terkait dengan perluasan akses pendidikan sesuai dengan indikator dari variabel penelitian.

a. *Equality*/Persamaan hak dalam pelayanan pendidikan di Sekolah

Dalam mengimplementasikan upaya perluasan akses pendidikan formal di SMK Negeri 1 Bandar Lampung diperlukan adanya persamaan dan keadilan terhadap peserta didik tidak mampu. Maksud dari persamaan dan keadilan ini ialah, persamaan memperoleh pendidikan tanpa mengenal status sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Di SMK Negeri 1 Bandar Lampung, *equality*/persamaan hak memperoleh layanan pendidikan ini diberikan kepada peserta didik penerima program BOSDA yang mengacu kepada pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, kesamaan hak untuk bermain, mendapatkan kesehatan dan perlindungan yang cukup dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah dan tentunya berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa terhalang biaya.

b. *Equity*/Keadilan dalam perlakuan adil terhadap pelayanan pendidikan di Sekolah

Program BOSDA di SMK Negeri 1 Bandar Lampung dalam konteks perluasan akses

pendidikan tidak menuntut adanya perbedaan perlakuan bagi peserta didik tidak mampu, baik dalam menikmati fasilitas di sekolah, menentukan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihan peserta didik, maupun dalam kegiatan belajar mengajar dikelas. Peserta didik penerima BOSDA maupun reguler, semua berhak secara adil disamaratakan tanpa adanya diskriminasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang sudah disesuaikan dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah Daerah di SMK Negeri 1 Bandar Lampung telah dilaksanakan dengan baik dan penuh dukungan baik dari sekolah maupun peserta didik sebagai seseorang yang merasakan program tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa program BOSDA memang berperan dalam perluasan akses pendidikan, seperti memberikan kesempatan bagi peserta didik tidak mampu memperoleh akses pendidikan melalui pendidikan formal dengan meniadakan biaya pendidikan bagi peserta didik seperti SPP, memberikan bantuan operasional pembelajaran seperti tersedianya alat dan bahan untuk praktik, dan membebaskan pungutan biaya ekstrakurikuler dan program bimbel/les di sekolah bagi peserta didik tidak mampu.

Peran program BOSDA dilihat dari sasaran program di SMK Negeri 1 Bandar Lampung sasaran difokuskan kepada bantuan operasional pembelajaran khususnya bagi peserta

didik tidak mampu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan baik negeri maupun swasta agar dapat menekan angka putus sekolah khususnya di SMK. Disisi lain, program BOSDA SMK Negeri 1 Bandar Lampung ternyata telah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan aturan dan juknis yang telah ditetapkan, walaupun mengalami kendala-kendala kecil tetapi masih dapat diatasi dengan pemberian sosialisasi.

SMK Negeri 1 Bandar Lampung memberikan sebesar 60 persen penerimaan bagi peserta didik tidak mampu, hal ini menimbulkan sisi positif dan negatif. Sisi positifnya ialah terlihat bahwa SMK Negeri 1 Bandar Lampung telah berupaya mendukung perluasan akses pendidikan dengan mengajukan permohonan program BOSDA yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sedangkan sisi negatifnya yaitu hal ini seringkali dijadikan kecurangan bagi masyarakat mampu yang ingin mendapatkan program BOSDA juga.

Program BOSDA di SMK Negeri 1 Bandar Lampung mengedepankan upaya memperluas pemberian kesempatan yang setara bagi peserta didik yang tidak mampu untuk mendapatkan akses layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu serta menekan angka putus sekolah terhadap SMK tetapi tidak menuntut adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan baik kegiatan ekstrakurikuler, prakerin, maupun kegiatan belajar mengajar.

Saran

1. Bagi Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan diharapkan lebih memperhatikan pendanaan

dalam program BOSDA dengan menambah besaran alokasi dana per individu sehingga kebutuhan peserta didik di sekolah dapat tercukupi.

2. Bagi Sekolah
Sekolah diharapkan dapat memanfaatkan program BOSDA sesuai dengan juknis yang ada sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan program BOSDA di Sekolah.
3. Bagi Peserta Didik
Peserta didik penerima BOSDA diharapkan belajar lebih giat dan aktif dalam kegiatan yang dilakukan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu., & Uhbiyanti, Nur. 2015. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badruzzaman. 2013. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Di Kabupaten Sorong. *Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*. Volume 19.
- Bakry, Aminuddin. 2010. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*. Volume 2. Nomor 1.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasbullah. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herdiyansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Ihsan, Fuad. 2008. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kadir Abdul, Fauzi Ahmad, dkk. 2012. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kintamani, Ida. 2008. Kesenjangan Gender Dalam Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. Volume 14. Nomor 75.
- Provinsi Lampung. 2017. *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017, Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017*.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syarbaini, Syahril & Rusdiyanta. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.